

FLYPAPER EFFECT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH

Bunga Septianayu Dwi Putri

septianbunga@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to analyze and test Flypaper influence of general allocation fund (DAU) and local revenue (PAD) on Regional Expenditure at Regency or City Government in East Java Province. While the population in this research is all districts atau cities in the East Java province, and the sample of this research amounted to 35 districts atau cities. The type of data used is secondary data, in the form of Realization Report of Local Government Budget in East Java in 2012 until 2015. The research method is quantitative with the analysis technique using multiple linear regression analysis. The results of this research indicates that the general allocation fund and the revenue of the region have a positive influence on local expenditure. The results of this research have supported all the hypotheses that have been formulated in this research. Flypapper influence occurs in East Java Province in 2012 until 2015, this can be known by the coefficient value of General Allocation Fund is greater than the original revenue coefficient.

Keywords: flypaper effect, general allocation fund, local original income, regional expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji *Flypaper effect* dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan sampel dari penelitian ini sebesar 35 Kabupaten atau Kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota atau Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sehingga *Flypapper effect* terjadi pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sampai dengan 2015, hal ini dapat diketahui dengan nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada koefisien Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *flypaper effect*, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah.

PENDAHULUAN

Semenjak era orde baru, orientasi pada penguasa masih sangat kuat dalam kehidupan birokrasi publik. Birokrasi pada era orde baru bisa dikatakan masih jauh dari tingkat akuntabilitas dan transparansi, padahal kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2002) Akuntabilitas Publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kinerja finansial Pemerinah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sukriy dan Halim (2003) melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten atau kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t-1, namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digenerasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2001) pemerintah daerah

Kabupaten atau Kota Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Maimunah (2006) melakukan penelitian yang sama pada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Sukriy dan Halim (2003) yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap Belanja Daerah t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan sampel Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah dan Total Belanja serta laporan APBD Pemerintah Kota atau Kabupaten wilayah Jawa Timur, hal ini dikarenakan bahwa Kota atau Kabupaten wilayah Jawa Timur ini memiliki karakteristik ekonomi yang sama dengan penelitian sebelumnya dan ketersediaan data pada penelitian (Maimunah 2006).

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dilakukannya untuk: (1) Untuk memberikan bukti empiris apakah DAU berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten atau Kota Jawa Timur; (2) Untuk memberikan bukti empiris apakah PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten atau Kota Jawa Timur; (3) Untuk memberikan bukti empiris apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2012-2015.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintah pusat. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang ekonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berwenang dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001). Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan APBD.

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Untuk Indonesia, perkembangan manajemen dan administrasi publik memang dinilai kurang maju. Tetapi dengan adanya otonomi daerah menyebabkan muncul era baru dalam sistem administrasi pemerintah dan manajemen publik. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 2002).Mardiasmo (2002) dijelaskan momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*instutiona reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik.

Desentralisasi

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia telah mmbuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Disamping itu reformasi telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan. Akibat dari reformasi tersebut pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyebaran wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, dalam rangka melihat dampak atau kaitannya dengan layanan publik, desentralisasi bisa dibedakan atas 3 jenis: (1) Desentralisasi politik; (2) Desentraslisasi administrasi; (3) Desentralisasi fiskal.Walaupun demikian, dengan desentralisasi bukan berarti semua proses pengambilan keputusan di setiap tingkat pemerintahan dilakukan terpisah (sendiri-sendiri) secara independen. Untuk banyak sektor, tidak jarang keputusan dilakukan *mixed* oleh berbagai tingkat pemerintahan. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu; pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah; kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengamilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Shah, 1994).

Perimbangan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan kuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.Sejalan dengan pembagian kewenangannya disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka asas desentralisasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas

beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Khusaini, 2006).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki karakteristik sebagai berikut ; (a) Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; (b) Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara; (c) APBD mempunyai fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, aloasi, distribusi, dan stabilisasi; (d) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha untuk pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Mardiasmo (2002: 146) pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Lanjutnya, langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil dimiliki daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 belanja daerah dibagi ke dalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja keluarannya tidak berupa fisik dan terjadi berulang-ulang sepanjang waktu atau periode. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, anggaran pinjaman atau hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tak terduga. Belanja pembangunan adalah belanja yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan, sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasilan cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Von Furstenberg *et al.* (dalam Sukriy dan Halim, 2003). Bahwa dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*. Hipotesis ini mengandung mana bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Legrensi dan Milas, 2001 (dalam Maimunah, 2006) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Berdasarkan peneliti terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit DAU yang diterima maka daerah tersebut mandiri dan siap menghadapi otonom. Masdjojo (2015) dengan hasil menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja modal, hal ini menyatakan bahwa dana perimbangan yang dialokasikan untuk menentukan pembiayaan untuk membiayai belanja modal, yang terdiri dari tiga indikator dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil tersebut dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan peneliti terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Flypaper Effect

Oates, 1999 (dalam Sukriy dan Halim, 2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri maka hal ini disebut *flypaper effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. Hasilnya menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, baik tanpa *lag*, pengaruh DAU terhadap BD lebih signifikan daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera (Maimunah, 2006). Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, maka hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect* adalah:

H3 : Pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih sampel di provinsi ini adalah (1) memiliki karakteristik ekonomi maupun geografis yang tinggi, (2) ketersediaan data.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah populasi tersebut. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD Pemerintah Kota atau Kabupaten di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2012 sampai 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data tersebut diambil dari sensus yang bersumber dari laporan realisasi APBD pemerintah Kota atau Kabupaten Wilayah Jawa Timur. Dari masalah yang diteliti teknik dan alat digunakan serta tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah data dokumenter yang dimana mencatat laporan yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provisi Jawa Timur serta Dinas Pendapatan Pelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel berisi pernyataan tentang arti dan maksud variabel-variabel penelitian, dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan data yang digunakan, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Yang dimaksudkan dengan belanja daerah adalah angka realisasi belanja daerah Pemerintah Kota atau Kabupaten Wilayah Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 sampai 2016 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DAU dan PAD.

Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian ini adalah angka realisasi DAU Pemerintah Kota atau Kabupaten di wilayah Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 sampai 2016 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Belanja Daerah). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angka realisasi PAD Pemerintah Kota atau Kabupaten di wilayah Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 sampai 2016 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Flypaper effect tidak dijabarkan definisi operasionalnya. Hal ini dikarenakan *flypaper effect* merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel di atas. Dalam hal ini ketika koefisien DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah daripada PAD maka, situasi ini disebut *flypaper effect*.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat hubungan pendapatan yaitu PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja daerah. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BDR) secara *cross-section* dengan persamaan sebagai berikut :

$$BDR = \alpha + \beta_1 \text{ DAU} + \beta_2 \text{ PAD} + e_i$$

Keterangan:

BDR : Belanja Daerah

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi Variabel Bebas

DAU : Dana Alokasi Umum

PAD : Pendapatan Asli Daerah

e_i : *Error item*

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pngganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2005). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolineraitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance an Variance Inlation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independent menjadi variabel dependen (terkait) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) atau nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2005).

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

Uji Heteroskedastisitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain sama, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedestisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas digunakan uji, yaitu dengan menguji tingkat signifikasi. Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level

signifikan ($p > 0,05$), maka tidak terdapat heteroskedastisitas, apabila di bawah level signifikan ($p < 0.05$).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikan F pada output asil regresi dengan *level* signifikansisebesar 0.05. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($p > 0.05$) maka hipotesis ditolak, artinya secara simultan variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap dependen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($p > 0.05$) maka hiptesis diterima, artinya secara simultan variabel-variabel idependen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable dependen.Selain uji F, untuk menguji kelayakan model regresi juga digunakan uji koefisien determinasi. Koefisiendeterminasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (uji t) berguna untuk menguji besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dengan ketentuan sebagai berikut, apabila tingkat signifikansi $t < \alpha = 0.05$ ($p > \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika tingkat signifikansi $t >$ dari $\alpha = 0.05$ ($p > \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut Tabel 1 yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini, tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 140.Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 309.102 dan terbesar adalah 1.613.161.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	140	309.102	1.613.161	8.39E5	278.499,538
PAD	140	5.729	4.035.649	2.99E5	529.072,494
BDR	140	435.188	6.490.359	1.60E6	895.821,035
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data Sekunder 2012-2015, diolah

Rata-rata variabel Dana Alokasi Umum Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 8.39,0000005 dan standar deviasi sebesar 278.499,538. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 5.729 dan terbesar adalah 4.035.649. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah sebesar 2.99,0000005. Standar deviasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 529.072,494. Pada variabel Belanja Daerah (BDR) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 435.188 dan terbesar adalah 6.490.359. Rata-rata variabel Belanja Daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 1.60,0000006 dan standar deviasi sebesar 895.821,035.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BDR) Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur secara linier. Hasil dari analisis regresi linier berganda nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-50047.660	47390.033		-1.056	.293
DAU	1.548	.057	.481	27.351	.000
PAD	1.184	.030	.700	39.762	.000

a. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder 2012-2015, diolah.

Berdasarkan Tabel 2, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BDR = -50047,660 + 1,548 \text{ DAU} + 1,184 \text{ PAD}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi pada Tabel 4, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1) Konstanta (α), konstanta merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah -50047.660 menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah = 0 atau konstan, maka variabel belanja daerah akan sebesar -50047.660; (2) koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar 1,548, besarnya nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1,548, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur; (3) koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar 1,184, besarnya nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1,184, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,071 > 0,050, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka

dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berarti model yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas dari multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian heteroskedastisitas, didapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Hasil pengujian statistik, menunjukkan angka *Durbin Watson* sebesar 1,270. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel Belanja Daerah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil dari Uji Kelayakan Model, tampak pada Tabel 3.

Hasil pengujian pada Tabel 3 dibawah ini, didapat tingkat signifikansi Uji Kelayakan Model = 0,000 < 0.05 (*level of significant*), yang menunjukkan pengaruh variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah model layak terhadap Belanja Daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur dan dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.074E14	2	5.371E13	1.787E3	.000 ^a
	Residual	4.117E12	137	3.005E10		
	Total	1.115E14	139			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder 2012-2015, diolah

Koefisiendeterminasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.963	.963	173356.554

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder 2012-2015, diolah

Hasil pada Tabel 4, didapat *R square* (R^2) sebesar 0,963 atau 96,3% yang menunjukkan kontribusi dari variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya 3,7% dikontribusi oleh faktor lain diluar model penelitian. Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,981 atau 98,1% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang erat.

Uji t

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel nilai perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil pengujian uji t yang disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil pengujian uji tpada Tabel 5 dibawah ini, diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah lebih kecil dari $\alpha = 0,050$ (*level of significant*).

Tabel 5
Hasil Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-50047.660	47390.033		-1.056	.293
DAU	1.548	.057	.481	27.351	.000
PAD	1.184	.030	.700	39.762	.000

a. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder 2012-2015, diolah

Menunjukkan pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Uji t adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menemukan bahwa dana alokasi umum memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan Halim (2003), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah, hal ini menunjukkan pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Dana alokasi umum merupakan komponen dari dana perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi. Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang kecil, dana alokasi umum sangat berperan penting bagi pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan Halim (2003). Salah satu pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah yang oleh karena itu pendapatan asli daerah memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan, karena pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

***Flypaper Effect* Terjadi Pada Kabupaten atau Kota Di Jawa Timur**

Hasil uji analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sampai dengan 2015, hal ini dapat diketahui dengan nilai koefisien dana alokasi umum sebesar 1,548 lebih besar dari koefisien pendapatan asli

daerah sebesar 1,184 dimana memiliki arti bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur atau dapat difungsikan jika $1,548 > 1,184$. Besaran transfer tidak bersyarat dalam hal ini dana alokasi umum secara signifikan mempengaruhi belanja daerah. Dalam jangka pendek kenaikan pada dana alokasi umum akan meningkatkan kenaikan pengeluaran. Hasil ini membuktikan bahwa *flypaper effect* terjadi. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.

Pendapatan sendiri juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan dalam membiayai pelayanan publik. *Flypaper effect* membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri. *Flypaper effect* yang terjadi diibaratkan bahwa dana transfer pusat hanya berpindah saja antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah tanpa imbas dan pencapaian tujuan seharusnya dari dana tersebut dalam hal ini, seharusnya transfer pemerintah pusat dapat menstimulus perekonomian daerah melalui belanja daerah yang kemudian seharusnya menciptakan potensi fiskal dari perekonomian tersebut seperti misalnya melalui pajak, retribusi. Fenomena *flypaper effect* tampaknya lebih cocok dijelaskan dengan model birokratik. Pertama, masyarakat tidak bisa mempengaruhi tingkat bagi hasil pajak dan bukan pajak serta tarif pajak dan retribusi daerah. Kedua, birokrat memiliki keleluasaan dalam membelanjakan DAU, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterimanya. Ketiga, sebelum dibelanjakan agenda pengeluaran disusun terlebih dahulu. Konsekwensinya, dengan kenaikan perolehan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dengan tingkat yang tinggi pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, model layak digunakan untuk mengetahui penelitian terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur; (2) Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga belanja daerah, pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, dana alokasi umum dibutuhkan secara efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik; (3) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri; (4) *Flypaper effect* terjadi pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sampai dengan 2015, hal ini dapat diketahui dengan nilai koefisien dana alokasi umum lebih besar dari koefisien pendapatan asli daerah, besaran transfer tidak bersyarat dalam hal ini dana alokasi umum secara signifikan mempengaruhi belanja daerah. Dalam jangka pendek kenaikan pada dana alokasi umum akan meningkatkan kenaikan pengeluaran. Hasil ini membuktikan bahwa *Flypaper Effect* terjadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang dierikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur harus mampu menggali sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya di daerahnya; (2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, dan menggunakan data yang mempunyai rentang waktu yang lebih dari lima tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Mungkin hasilnya akan lebih baik apabila data yang digunakan adalah data yang mempunyai rentang waktu yang lebih lama. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2012-2015.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan studi ini adalah: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, dan menggunakan data yang mempunyai rentang waktu yang lebih dari empat tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut; (2) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan APBD. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan lain yang lebih mendalam, misalnya dengan menggunakan *field research* dengan kuisioner dan wawancara dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. 2005. *Analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*16(4): 346-357.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Khusaini. 2006. Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Fiskal dalam Penerapan Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Tahun 1994-2004. *Tesis*.Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Maimunah, N. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kota atau Kabupaten di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Masdjojo. 2015. Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16(1):75-84.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Shah, A. 1994. *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. Policy and Paper Series No. 23 The World Bank*. Washington DC.
- Sukriy, A. dan A. Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten atau Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.